

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arie, Marthen. 2019. *Hukum Otonomi Daerah: Strategi Perampangan dan Harmonisasi Regulasi Pusat dan Daerah*. Makassar: Social Politic Genius (SIGn).
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Administrasi Pemerintahan*. Jakarta: Konstitusi Press, 2022. hlm. 112
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2022. hlm. 13
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konstitusi Press, 2022. hlm. 34
- Djumhana, Ahmad. *Dasar-Dasar Hukum Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013. hlm. 121
- Friedmann, W. *Law in a Changing Society*. London: Stevens & Sons, 1975. hlm. 76
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987. hlm. 24
- Hadi, M. Syamsul. *Manajemen Usaha Kecil dan Menengah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015. hlm. 18
- Mertokusumo, Sudikno. *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi. Yogyakarta: Liberty, 2012. hlm. 75
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2007. hlm. 52
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2003. hlm. 45
- Pound, Roscoe. *An Introduction to the Philosophy of Law*. New Haven: Yale University Press, 1922. hlm. 35
- Radbruch, Gustav. *Legal Philosophy*. Oxford: Oxford University Press, 1950. hlm. 68

- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas, 2009. hlm. 56
- Salim, Harun. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015. hlm. 108
- Sen, Amartya. *Development as Freedom*. New York: Anchor Books, 1999. hlm. 75
- Siregar, Ferry. *Keuangan Negara dalam Perspektif Hukum Administrasi*. Jakarta: Prenada Media, 2019. hlm. 133
- Siregar, Hadi. *Manajemen Piutang Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021. hlm. 134
- Suharto, Edi. *Kebijakan Sosial: Sebuah Pengantar*. Bandung: Alfabeta, 2020. hlm. 219
- Sulaiman, Muhammad. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014. hlm. 150
- Van Apeldoorn, L.J. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2007. hlm. 29
- Widodo, Joko. *Hukum Keuangan Negara*. Yogyakarta: FH UII Press, 2022. hlm. 201
- Winarno, Budi. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2023. hlm. 71

B. Jurnal Ilmiah

- Arie, Marthen. 2018. "Penataan Kelembagaan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Berdasarkan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik." *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Vol. 48, No. 2.
- Djamil, M. Nasir. *Etika Publik Pejabat Negara dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih*. 2016
- Gubali, Agustina Wati. *Analisis Pengaturan Gratifikasi Menurut Undang-Undang di Indonesia*. 2013
- Prasojo, Eko. Inovasi Kebijakan Publik di Era Digital. *Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol. 14, No. 2 (2023): hlm. 67

- Prasojo, Eko. Politik Hukum dalam Kebijakan Ekonomi Inklusif. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 53, No. 2 (2023): hlm. 178
- Rachmad, Faisal. Kebijakan Penghapusan Piutang Negara sebagai Perlindungan UMKM. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 53, No. 3 (2023): hlm. 376
- Sugeng. Moral Hazard dalam Kebijakan Penghapusan Utang UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. 18, No. 1 (2024): hlm. 85
- Yudistira Rusydi. Pertanggungjawaban Pejabat Negara Atas Penyalahgunaan Kewenangan. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2022

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3), Pasal 33
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 9, 14 ayat (2), dan 55
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pasal 1, 6
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 11
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pasal 2, 4, 6 8
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 240/PMK.06/2022 tentang Pengelolaan Piutang Negara, Pasal 61
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/KMK.06/2021 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara

Otoritas Jasa Keuangan, POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Ekonomi Nasional terhadap Dampak COVID-19

D. Sumber Internet / Media Online

Detik.com. (2024, 5 November). *Pemerintah Tegaskan Tak Semua Pelaku UMKM Dihapus Piutangnya, Ini Syaratnya.*

Hukumonline.com. (2024, 15 Desember). *Pekerjaan Rumah Bank/Lembaga Keuangan Non-Bank BUMN Pasca Terbitnya PP 47/2024.*

Kementerian PAN-RB. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2023. Diakses 18 April 2025.
<https://www.menpan.go.id/lakip2023>

Kementerian Koperasi dan UKM RI. Profil UMKM Indonesia 2023. Diakses 18 April 2025.
<https://www.kemenkopukm.go.id/profil-umkm>

Kontan.co.id. (2024, 21 November). *PP 47/2024, Solusi Keberlanjutan Bagi UMKM dengan Riwayat Kredit Macet.*

RRI.co.id. (2024, 21 November). *Ini Syarat Penghapusan Piutang UKM Menurut PP Nomor 47 Tahun 2024.*